



**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan  
Terpadu Satu Pintu**



**LAPORAN KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH**

**2022**



# KATA PENGANTAR

Kepala Dinas

*Drs. A. Amran, M.Si*

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas Rahmat dan Karunia-Nya, kami telah menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone Tahun 2022.

LKjIP Perangkat Daerah merupakan bentuk komitmen nyata Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja

a Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Proses kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk LKjIP.

Tujuan penyusunan LKjIP untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan

tugas pokok dan fungsi organisasi di masing-masing Perangkat Daerah serta untuk mengetahui tingkat keberhasilan capaian sasaran saat ini sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja pada masa yang akan datang. Melalui penyusunan LKjIP juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip *good governance*, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah.

Demikian LKjIP ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak yang berkepentingan, khususnya untuk peningkatan kinerja dimasa mendatang.

Watampone, 25 Januari 2023

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pntu

**Drs. ANDI AMRAN, M.Si**  
Pangkat : Pembina Utama Muda  
NIP 19681122 198908 1 001

# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.i</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
A. UMUM .....	1
B. ORGANISASI.....	2
C. ISU STRATEGIS .....	5
D. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI.....	7
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA .....</b>	<b>9</b>
A. TUJUAN DAN SASARAN.....	9
B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	11
C. INDIKATOR KINERJA UTAMA .....	13
D. PERJANJIAN KINERJA .....	14
E. STANDARD PENILAIAN KINERJA.....	15
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	<b>17</b>
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI .....	17
B. REALISASI ANGGARAN.....	37
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>38</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. UMUM

Penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi salah satu kunci untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKj dilakukan dengan

berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Proses penyusunan LKj dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah, yang dalam hal ini adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu LKj menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam

mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Disinilah esensi dari prinsip akuntabilitas sebagai pijakan bagi instansi pemerintah ditegakkan dan diwujudkan.

Mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2017, LKj tingkat SKPD disampaikan kepada Gubernur/Bupati/Walikota selambat-lambatnya dua bulan setelah tahun anggaran berakhir.

LKj Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah selama kurun waktu 1 (satu) tahun secara sistematis dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan LKj juga menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi.

## **B. ORGANISASI**

Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Bone tahun 2016 , tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 6), yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Bone Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone.

LKj Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan proses untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran yang selanjutnya dianalisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan. Identifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang tertuang dalam LKj, menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang. Dengan pendekatan ini, LKj sebagai proses evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perbaikan yang berkelanjutan di pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintahan melalui perbaikan pelayanan publik.

Tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Bone sesuai Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2021 sebagaimana disebutkan diatas adalah sebagai berikut :

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

**Tugas pokok :** membantu Bupati dalam melaksanakan kebijakan daerah bidang Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah sesuai Peraturan perundang-

**Fungsi:**

- Perumusuan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang penanaman modal, perizinan dan non perizinan;
- Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal, perisiann dan non perizinan;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang penanaman modal, perizinan dan non perizinan;
- Pelaksanaan administrsi dinas urusan pemerintahan bidang penanaman modal, perizinan dan non perizinan;
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

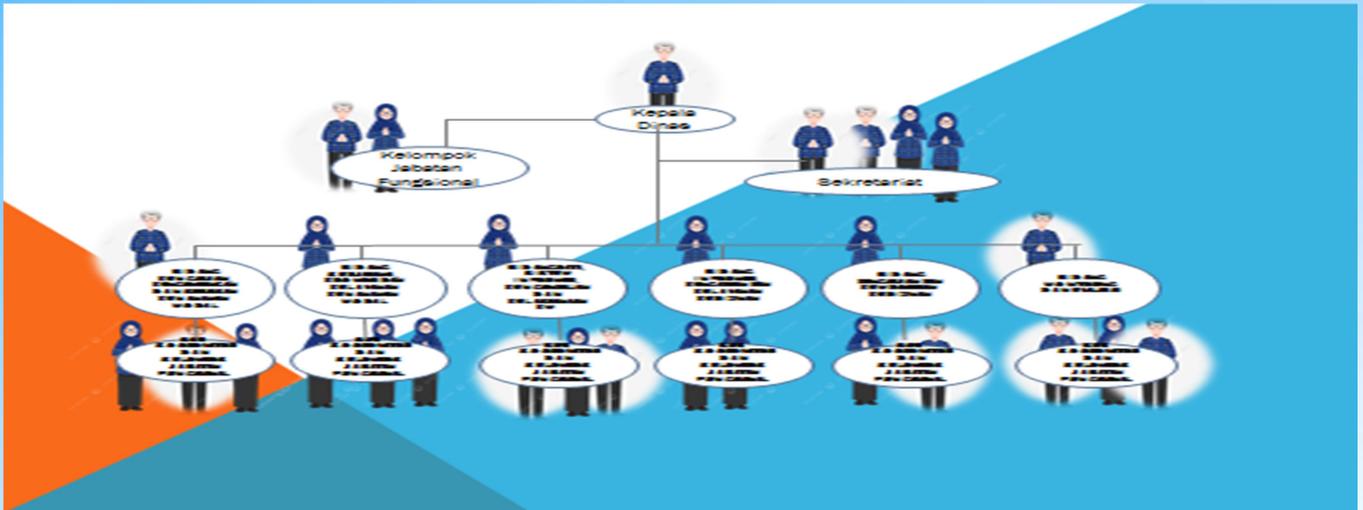
PERBUP  
SOTK  
DPMPTSP



SCAN ME

Untuk lebih jelas dari susunan organisasi dapat dilihat pada struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone.

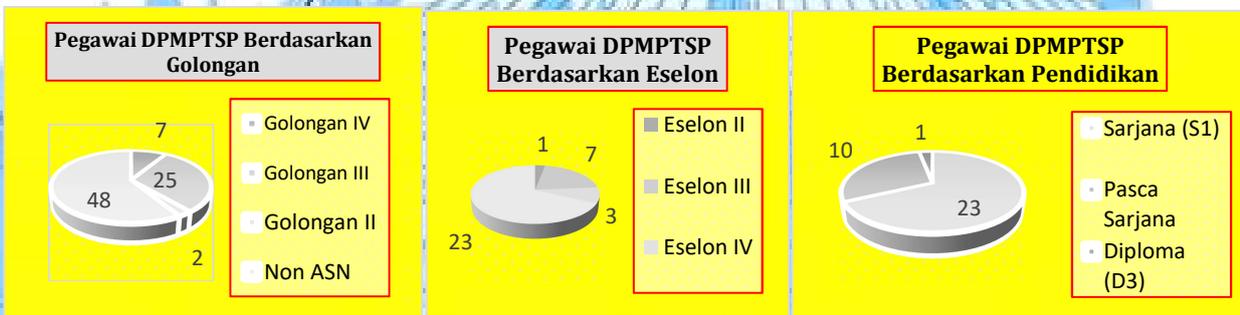
Gambar 1.1  
**STRUKTUR ORGANISASI**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**



**Sumber data : PERBUP SOTK DPMPTSP Nomor 83 Tahun 2021**

Susunan Kepegawaian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dalam menjalankan roda organisasi sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusianya dan perlengkapan yang dimiliki yang merupakan elemen penting dalam menggerakkan organisasi sekaligus sebagai faktor yang berpengaruh dan menentukan dalam mencapai tujuan organisasi. Susunan kepegawaian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone dikelompokkan menurut golongan kepangkatan, tingkat pendidikan dan eselon.

**Gambar 1.2**  
**Diagram Pegawai berdasarkan Golongan, Eselon dan Pendidikan**



**Sumber data: Dokumen Data Umum Kepegawaian DPMPTSP**

### C. ISU STRATEGIS

Sejalan dengan perkembangan zaman dan pertumbuhan ekonomi daerah yang berkembang dengan sangat pesat maka dalam perencanaan strategis 2021- 2023 harus mempertimbangkan dan melihat isu-isu strategis yang ada antara lain:

1. Tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik semakin tinggi. Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan yang adil, transparan dan akuntabel benar-benar dibutuhkan masyarakat sehingga perlu diwujudkan dan ditingkatkan secara konsisten;
2. Pada satu sisi tuntutan peningkatan kualitas pelayanan semakin tinggi pada sisi yang lain kemampuan anggaran sangat terbatas padahal dukungan anggaran sangat penting dalam keberhasilan suatu program dan kegiatan;
3. Pengembangan promosi potensi investasi diharapkan dapat menarik para investor untuk menanamkan modalnya atau berinvestasi di Kabupaten Bone;

Melalui program dan kegiatan yang disusun Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone dengan partisipasi berbagai pihak pada tahun yang akan datang diharapkan dapat memperbaiki kondisi yang ada. Kondisi umum Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone secara makro yang diinginkan atau diproyeksikan ke depan pada akhir Pembangunan Jangka Menengah (PJM) yaitu tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- Semua izin diharapkan didukung dengan SIM Perizinan yang komprehensif;
- Semua jenis perizinan yang ditangani sudah ada payung hukumnya ( Perda, Perwal, Perka, dsb) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Investasi di Kabupaten Bone meningkat, terciptanya lapangan kerja sehingga kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bone menjadi meningkat;
- Didukung sarana dan prasarana yang layak, memadai dan memudahkan bagi kaum Disabilitas khususnya;

- Jumlah SDM yang ideal sesuai Analisis Jabatan 72 (Tujuh Puluh Dua) orang.

#### D. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Inovasi menjadi kunci dalam reformasi birokrasi dan perbaikan kinerja pelayanan publik, oleh karena itu berbagai inovasi juga telah dikembangkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yaitu dengan terbitnya Peraturan Bupati Bone Nomor 272 Tahun 2021 tentang Pelayanan Publik Jemput Antara Perizinan Penelitian dan Perijinan Praktek Tenaga Medis. Selain itu dengan menghadirkan Mal Pelayanan Publik (MPP) di Kabupaten Bone yang akan launching pada tahun 2023.



PERBUP  
INOVASI  
JEMARI  
PERAK

Mal Pelayanan Publik ini diharapkan dapat memangkas birokrasi dalam hal proses perizinan di berbagai bidang menjadi lebih cepat dan mudah, sesuai dengan misi kelima Kabupaten Bone, yakni "Mendorong Penciptaan Iklim Investasi yang Kondusif Untuk Pengembangan Usaha dan Mengembangkan Inovasi Daerah dalam Peningkatan Pelayanan Publik". Tujuan akhir tentunya adalah demi mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Bone yaitu

*MASYARAKAT BONE YANG MANDIRI, BERDAYA SAING, DAN SEJAHTERA*

Dengan hadirnya Mal Pelayanan Publik juga diharapkan mampu membentuk ASN mode yang memiliki pola pikir untuk berkinerja tinggi, dan selalu memberikan pelayanan yang terbaik, sehingga berdampak pada tumbuhnya industri mikro dan kecil, memperkuat daya saing global, dan tumbuhnya minat investor sehingga perekonomian serta kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bone semakin meningkat. Seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Bone diharapkan mampu memberikan kontribusi terbaiknya untuk melanggengkan keberadaan Mal Pelayanan Publik, dan mengembangkannya dengan sistem serta sinergitas yang utuh.



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone berhasil meraih terbaik pertama dalam tahapan penilaian SSIC tahun 2022. Kegiatan SSIC merupakan wadah bagi proyek-proyek terbaik se-Sulawesi Selatan untuk dipromosikan di berbagai negara yang bertujuan menjalin sebanyak mungkin proyek strategis dari masing-masing Kabupaten/ Kota di Sulawesi Selatan, melalui penyusunan *Investment Project Ready to Offer* atau IPRO dengan data-data yang valid mengenai proyek investasi yang *clean and clear*.

Dari kegiatan SSIC 2022 ini dapat memperoleh proyek investasi strategis terbaik di Sulawesi Selatan yang ke depannya akan dipromosikan secara massive, tidak hanya oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tapi juga Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan di berbagai forum

investasi dan luar negeri. Selengkapnya terkait kegiatan IPRO dapat diakses pada QR Code berikut :



# BAB II

## PERENCANAAN KINERJA

### A. TUJUAN DAN SASARAN

Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone Tahun 2021-2023 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan Kabupaten Bone 2018-2023. Rencana Strategis (RENSTRA) sebagai dokumen perencanaan yang memuat penjabaran visi, misi, tujuan, sasaran dan program SKPD selama 5 tahun yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Visi Pembangunan Kabupaten Bone 2018 – 2023 adalah:

**“Masyarakat Bone yang Mandiri, Berdaya Saing dan Sejahtera”**

Rumusan visi di atas mencakup tiga pokok visi yakni “Masyarakat Bone yang Mandiri”, “Masyarakat Bone yang Berdaya Saing”, dan “Masyarakat Bone yang Sejahtera”. Makna dari ketiga pokok visi tersebut adalah sebagai berikut:

1. **Masyarakat Bone yang Mandiri**, dapat dimaknakan sebagai kemampuan nyata pemerintah daerah dan masyarakatnya dalam mengatur dan mengurus kepentingan daerah/rumah tangganya sendiri menurut prakarsa dan aspirasi masyarakatnya, termasuk didalamnya upaya yang sungguh-sungguh secara bertahap mampu mengurangi ketergantungan terhadap pihak-pihak lain namun tetap melakukan kerjasama dengan daerah-daerah lain yang saling menguntungkan.
2. **Masyarakat Bone yang Berdaya Saing**, dapat diartikan sebagai terwujudnya kemampuan masyarakat Kabupaten Bone untuk memanfaatkan keunggulan inovasi, komparatif, dan kompetitif yang berbasis sumberdaya lokal dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan sehingga mampu bersaing secara regional, nasional, bahkan internasional.

3. **Masyarakat Bone yang Sejahtera**, mengandung makna semakin meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar yang berkelanjutan dalam aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan, politik, sosial budaya, lingkungan hidup yang dilingkupi dengan suasana kehidupan yang religius, aman dan kondusif serta didukung oleh infrastruktur dasar yang memadai dan tata kelola pemerintahan yang baik.

### **Misi Pembangunan Kabupaten Bone Tahun 2018-2023**

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
2. Mengembangkan kemandirian ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.
3. Meningkatkan akses, pemerataan, dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan, dan sosial dasar lainnya.
4. Mengoptimalkan akselerasi pembangunan daerah berbasis desa dan kawasan perdesaan.
5. Mendorong penciptaan iklim investasi yang kondusif untuk pengembangan usaha dan mengembangkan inovasi daerah dalam peningkatan pelayanan publik.
6. Meningkatkan budaya politik, penegakan hukum, dan seni budaya dalam kemajemukan masyarakat.

Dengan mengacu pada RPJMD Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018-2023, prioritas pembangunan disasar oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone adalah pada misi :

1. Misi kesatu : Mewujudkan Tata kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan bebas korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
2. Misi Kelima, yakni: “Mendorong penciptaan iklim investasi yang kondusif untuk pengembangan usaha dan mengembangkan inovasi daerah dalam peningkatan pelayanan public”

## Tujuan dan Indikator Kinerja

Mengacu kepada misi yang telah ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 tahun adalah, sebagai berikut:

*Tabel 2.1*

### *Tujuan dan Indikator Tujuan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Tahun 2021-2023*

NO	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja pada tahun		
				2021	2022	2023
1	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Urusan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		Predikat Evaluasi SAKIP Oleh APIP	BB	BB	A
2		Meningkatnya Kualitas Pelayanan DPMPTSP	Indeks Kepuasan Masyarakat	A	A	A
3	Meningkatkan Nilai Investasi Penanaman Modal di Kabupaten Bone		Presentase Peningkatan Investasi (persen)	15	18	21
4		Meningkatnya Daya Tarik Investasi Penanaman Modal di Kabupaten Bone	Nilai PMA/PMDN (Milyar)	300	350	400

*Sumber Data : Dokumen Renstra Perubahan 2021 – 2023*

## **B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Sebagai penjabaran Tujuan dan Sasaran yang ditetapkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone, maka ada beberapa

strategi dan arah kebijakan yang diambil agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan baik :

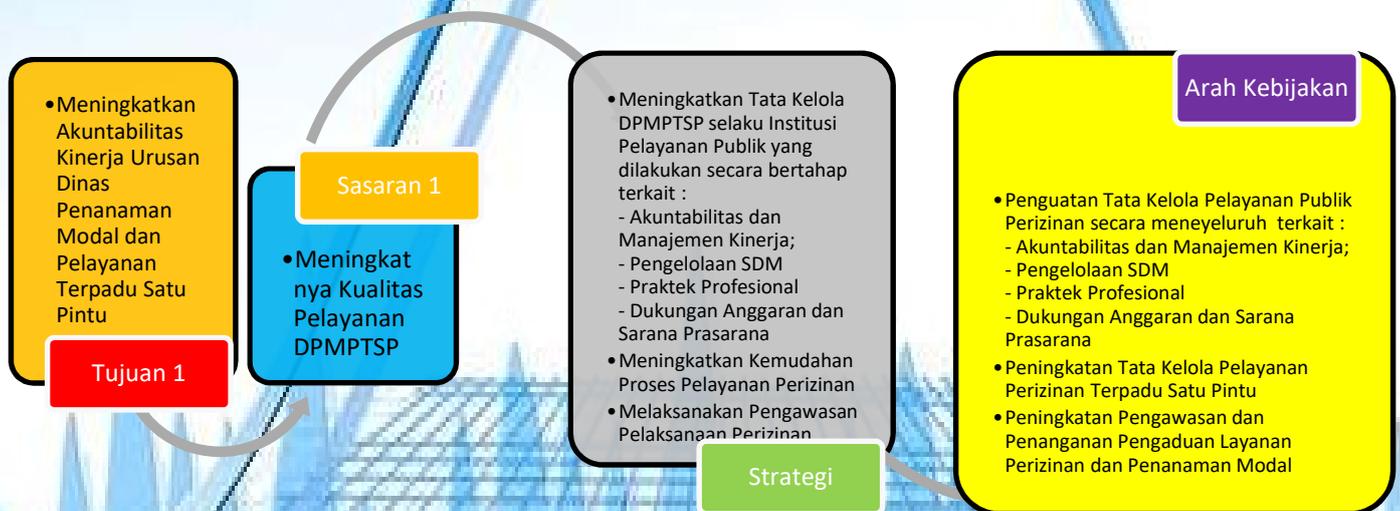
### 1. Strategi

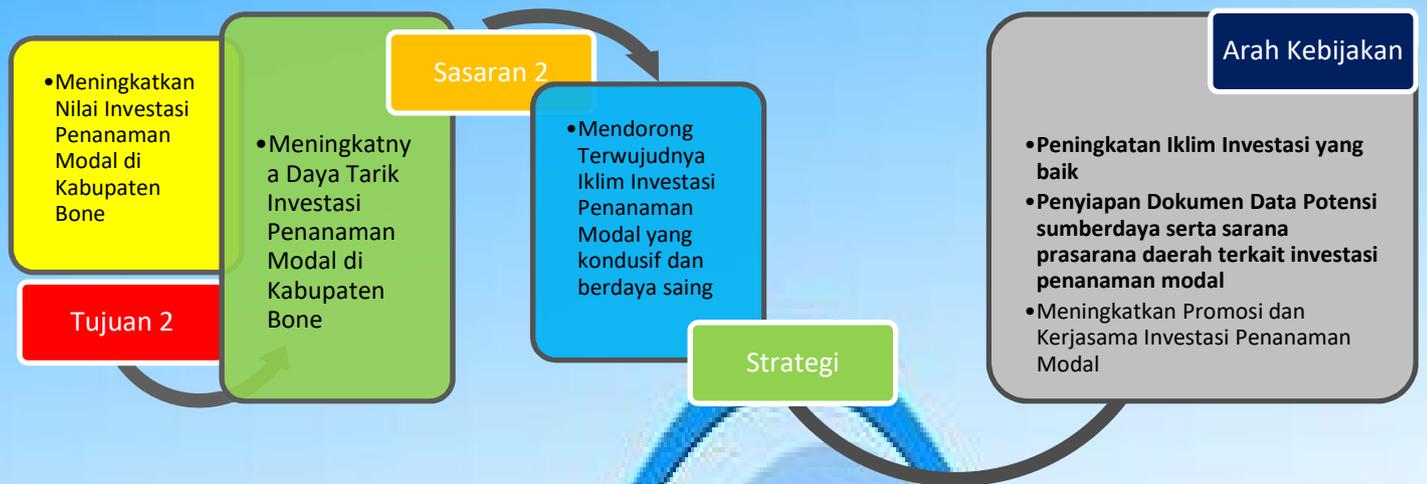
**Strategi** adalah suatu rencana untuk mencapai tujuan tertentu yang disusun sedemikian rupa oleh suatu organisasi sesuai dengan misi yang hendak diraihinya sekaligus untuk melaksanakan mandat/tugas-tugas yang diembannya dengan mempertimbangkan pengaruh faktor-faktor lingkungan eksternal maupun internal

### 2. Arah Kebijakan

**Arah kebijakan** merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

**Gambar 2.1**  
*Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan*





Dalam hal ini menunjukkan bahwa tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone sudah relevan dan konsisten terhadap Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati dalam RPJMD.

### C. INDIKATOR KINERJA UTAMA

**Indikator Kinerja Utama** adalah ukuran atau indikator kinerja suatu instansi, utamanya dalam mencapai tujuan dan sasaran tertentu. setiap lembaga atau instansi pemerintah wajib merumuskan indikator kinerja utama dan menjadikan hal itu sebagai prioritas utama.

Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ditetapkan melalui Peraturan Bupati Bone Nomor 101 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bone Nomor 87 Tahun 2018 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Bone.

**Tabel 2.3**  
**Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan PTSP**

NO	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Penjelasan / Formulasi Perhitungan
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan DPMPTSP	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat ditentukan dari asil Survey Kepuasan Masyarakat
2	Meningkatnya Daya Tarik Investasi Penanaman Modal di Kabupaten Bone	Nilai PMA/PMDN	Nilai PMA/PMDN

*Sumber data : Perbup Nomor 101 tahun 2021 tentang IKU*

**D. PERJANJIAN KINERJA**

Perjanjian Kinerja merupakan pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun. Perjanjian kinerja disepakati bersama antara penerima dan pemberi amanah dan merupakan ikhtisar Rencana Kinerja Taunan yang telah disesuaikan dengan ketersediaan anggaran.

**Tabel 2.4**  
**Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Anggaran
<b>Meningkatnya Kualitas Pelayanan DPMPTSP</b>	Indeks Kepuasan Masyarakat	A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Rp 592.264.538
			Program Pelayanan Penanaman Modal	Rp 623.695.000

<b>Meningkatnya Daya Tarik Investasi Penanaman Modal di Kabupaten Bone</b>	Nilai PMA/PMDN (Milyar)	350.000.000.000	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Rp 28.490.000
			Program Promosi Penanaman Modal	Rp 706.882.000
			Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp 355.476.000
			Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Rp 12.519.000
	<b>Jumlah</b>			<b>Rp7.619.326.538</b>

Sumber data : Perjanjian Kinerja



### E. STANDARD PENILAIAN KINERJA

Pengukuran Kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Standar penilaian kinerja terhadap laporan kinerja perangkat daerah merupakan tolak ukuran keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kebijakan teknis, program kegiatan dan sub kegiatan. Agar dapat dilakukan analisis terhadap hasil kinerja

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone maka telah ditetapkan standar pencapaian sebagai parameter keberhasilan datau kegagalan dari pelaksanaan kebijakan tekhnis, program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

**Tabel 2.5**  
**Standar Penilaian Kinerja**

<b>Nilai %</b>	<b>Pencapaian</b>
<b>&gt;100 %</b>	Sangat tercapai / Sangat berhasil
<b>90 % ≤ x &lt; 110%</b>	Tercapai / Berhasil
<b>60 % ≤ x &lt; 90 %</b>	Cukup Tercapai / Cukup berhasil
<b>x &lt; 60 %</b>	Tidak tercapai / Tidak berhasil

Rumus yang digunakan untuk menghitung presentase target capaian indikator kinerja adalah :

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \text{Realisasi/Target} \times 100\%$$

# BAB III

## AKUNTABILITAS KINERJA

### A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menunjukkan setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja setiap indikator tujuan / sasaran dalam perjanjian kinerja dengan realisasinya. Capaian indikator kinerja tujuan/sasaran atas perjanjian kinerja di atas mengacu pada tujuan / sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu meliputi :

*Tabel 3.1*

*Rencana Strategis DPMPTSP Tahun 2022*

Sasaran		Indikator
<b>Tujuan 1</b> <b>Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Urusan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan</b> Indikator : <b>Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP</b>		
<b>Meningkatnya Kualitas Pelayanan DPMPTSP</b>		Indeks Kepuasan Masyarakat
<b>Tujuan 2</b> <b>Meningkatkan Nilai Investasi Penanaman Modal di Kabupaten Bone</b> Indikator : <b>Presentase Peningkatan Investasi</b>		
<b>Meningkatnya daya tarik Investasi Penanaman Modal di Kabupaten Bone</b>		Nilai PMDN/PMA

Untuk setiap pernyataan kinerja tujuan/sasaran strategis tersebut di atas dilakukan analisis capaian kinerja tahun 2022 sebagai berikut :

### 1. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Capaian Kinerja Tahun Anggaran 2022 merupakan hasil pengukuran capaian kinerja sasaran yang diperjanjikan dalam perjanjian kinerja dalam Perjanjian Kinerja dengan membandingkan target kinerja dan realisasinya pada tahun 2022 sebagaimana dijelaskan dalam tabel sebagai berikut :

**Tabel 3.2**  
**Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022**

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian 201	Keterangan	Data Dukung
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan DPMPTSP	Indeks Kepuasan Masyarakat	A	A	100%	Tercapai / Berhasil	
	Meningkatnya Daya Tarik Investasi Penanaman Modal di Kabupaten Bone	Nilai PMA/PMDN (Milyar)	350.000.000.000	2.300.998.887.802	680%	Tercapai / Berhasil	
<b>Rata – rata</b>					390%	Tercapai / Berhasil	

**Sumber data : Evaluasi RENJA tahun 2022**

Berdasarkan data diatas rata rata capaian kinerja 390% dengan kategori pencapaian kinerja Melampaui Target.



### Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2021 – 2023

Tahun 2022 merupakan tahun kedua pelaksanaan Rencana Strategis Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2021- 2023. Adapun realisasi dan Capaian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu apabila disandingkan dengan tahun sebelumnya, diperoleh matriks sebagai berikut :

**Tabel 3.3**  
**Realisasi Kinerja Tahun 2021 - 2023**

Sasaran	Indikator Kinerja	Data Awal 2020	Realisasi Kinerja			Capaian Kinerja		
			2021	2022	2023	2021	2022	2023
Meningkatnya Kualitas Pelayanan DPMPSTP	Indeks Kepuasan Masyarakat	B 81	B 83,49	A 88,563		100	100	
Meningkatnya Daya Tarik Investasi Penanaman Modal di Kabupaten Bone	Nilai PMA/PMDN (Milyar)	176.807.169.329	278.269.682.501	2.300.998.887.802		93	680	

**Sumber Data : Evaluasi Renja Tahun 2022**

Berdasarkan data diatas dapat dijelaskan bahwa perbandingan capaian kinerja tahun 2021 – 2023 adalah sebagai berikut :

**Indeks Kepuasan Masyarakat**

Realisasi kinerja Tahun 2021 – 2022 mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2021 dengan Nilai B dan Skor 83,49 dan pada tahun 2022 dengan nilai A dan skor 88,563.

**Nilai PMA/PMDN (Milvar)**

Realisasi kinerja tahun 2021 – 2022 mengalami peningkatan yaitu tahun 2021 sebesar 278.269.682.501 dan tahun 2022 sebesar 2.300.998.887.802 dengan capaian kinerja tahun 2021 sebesar 93% dan tahun 2022 sebesar 680%.

**2. Realisasi Kinerja yang Mengacu pada Target Jangka Menengah Perubahan RENSTRA**

Analisa berikutnya dalam mengukur capaian kinerja tujuan/sasaran adalah dengan membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 dengan target jangka menengah sebagaimana tercantum pada Perubahan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2021 – 2023 seperti dalam tabel dibawah ini :

**Tabel 3.4**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan target jangka menengah**  
**Perubahan RENSTRA Tahun 2021-2023**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Jangka Menengah	Realisasi Kinerja			Capaian\ Rumus(capaian 2022/Target jangka menengah)
			2021	2022	2023	
Meningkatnya Kualitas Pelayanan DPMPTSP	Indeks Kepuasan Masyarakat	A	B 83,49	A 88,563		
Meningkatnya Daya Tarik Investasi Penanaman Modal di Kabupaten Bone	Nilai PMA/PMDN (Milyar)	1.050	278.269.682.501	2.300.998.887.802		

*Sumber data : Evaluasi Renja Tahun 2022*

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah tahun 2021-2023 adalah sebagai berikut :

### Indeks Kepuasan Masyarakat

Realisasi Kinerja Tahun 2022 mencapai predikat **A** dengan skor **88,563** jika dibandingkan dengan target jangka menengah RENSTRA dengan predikat **A** maka dapat disimpulkan bahwa capaian target kinerja RENSTRA sudah tercapai meskipun masih perlu peningkatan dari nilai skor yang dicapai.

### Nilai PMA/PMDN (Milyar)

Realisasi Kinerja Tahun 2022 sebesar **2.300.998.887.802** jika dibandingkan dengan target kinerja jangka menengah RENSTRA sebesar **1.050.000.000.000** sudah melebihi target jangka menengah RENSTRA akan tetapi capaian nilai investasi setiap tahun berjalan sangat tergantung dengan perolehan nilai investasi dari aplikasi perizinan secara online (OSS) yang selalu mengalami perubahan.

**3. Realisasi Kinerja dan Standar Pelayanan Minimal/Standar Nasional lainnya serta dengan Kabupaten / Kota yang setara/sekitar**

Analisa berikutnya dalam mengukur capaian kinerja tujuan/sasaran strategis adalah dengan membandingkan realisasi kinerja indikator tujuan/sasaran strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan target dan realisasi Standar pelayanan Minimal/Standar nasional sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 3.5**  
**Realisasi Kinerja dengan Kabupaten Kota yang setara/ sekitar**

NO	Indikator	Kabupaten / Kota	Realisasi 2022	Capaian 2022	Keterangan
1	Presentase Peningkatan Investasi (persen)		9,886	29,60%	
2	Nilai PMDN/PMA	Kabupaten Bone	2.300.998.887.802	680%	
		Kabupaten Wajo	163.141.321.525		Nilai Capaian tersebut merupakan nilai realisasi investasi yang diperoleh dari aplikasi LKPM oleh BKPM dan masih dalam proses pengolahan hingga saat ini data yang diperoleh masih hasil olahan 31 %

**Sumber data : Aplikasi OSS DPMPTSP Kabupaten Bone. Realisasi Investasi Kabupaten Wajo**

Berdasarkan tabel di atas, dijelaskan bahwa realisasi kinerja pencapaian tujuan/sasaran Nilai PMDN/PMA Kabupaten Bone senilai 2.300.998.887.802 jika dibandingkan dengan Kabupaten Wajo senilai 163.141.321.525, maka dapat disimpulkan bahwa capaian nilai PMDN Kabupaten Bone lebih tinggi dibanding Kab. Wajo akan tetapi capaian Kab. Wajo merupakan capaian Nilai Realisasi Investasi yang diperoleh melalui aplikasi LKPM dan untuk sementara perolehan nilai tersebut masih 31%, pihak BKPM belum merilis data realisasi investasi 100%, Sementara untuk perolehan nilai investasi Kabupaten Bone diperoleh dari nilai PMDN yang tercantum dalam aplikasi OSS terhitung sejak bulan Januari sampai dengan Desember tahun 2022.

#### 4. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Untuk menganalisa keberhasilan atau kegagalan indikator kinerja dalam rangka pencapaian tujuan/sasaran strategis kita lihat tabel Ikhtisar pencapaian capaian kinerja sebagai berikut :

**Tabel 3.6**  
**Analisa Keberhasilan dan Kegagalan Indikator Kinerja**

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian	Rata - rata capaian	Predikat			
					>110	90= $\leq$ s/d<110	60= $\leq$ s/d<90	<60
					Sangat berhasil	Berhasil	Cukup berhasil	Tidak berhasil
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan DPMPTSP	Indeks Kepuasan Masyarakat	100%	√				
	Meningkatnya Daya Tarik Investasi Penanaman Modal di Kabupaten Bone	Nilai PMA/PMDN (Milyar)	680%	√				
<b>Rata-rata Capaian Kinerja</b>			390%					

**Sumber data:** *Evaluasi RENJA DPMPTSP Tahun 2022*

Berdasarkan data pada tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa secara umum realisasi capaian indikator tujuan / sasaran strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2021 dalam kategori **Sangat Berhasil**.

Analisa penyebab keberhasilan dan kegagalan capaian indikator kinerja sasaran strategis dijelaskan sebagai berikut :

### **Indeks Kepuasan Masyarakat**

Realisasi kinerja Tahun 2021 – 2022 mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2021 dengan Nilai B dan Skor 83,49 dan pada tahun 2022 dengan nilai A dan skor 88,563. Laporan SKM DPMPTSP Tahun 2022 dapat diakses pada QR Code berikut :



Keberhasilan pencapaian kinerja tersebut disebabkan karena :

- Terbentuknya Inovasi Jemput antar perizinan dengan Surat Keputusan Bupati Bone Nomor 272 Tahun 2021 tentang Pelayanan Publik Jemput Antar Perijinan Penelitian dan Perijinan Praktek Tenaga Medis di Kec. Tanete Riattang, Kec. Tanete Riattang Timur dan Kec. Tanete Riattang Barat Kab. Bone.
- Tersedianya layanan perizinan online antara lain :
  - a. Layanan aplikasi Sistem Informasi Perizinan secara elektronik (SIMPEL) memfasilitasi masyarakat dalam pengurusan perizinan yang dapat diakses melalui website [www.dpmptspbone.co.id](http://www.dpmptspbone.co.id) dan dapat didownload melalui aplikasi Play Store.
  - b. Sistem perizinan berusaha secara online (OSS) yang memudahkan pelaku usaha untuk mendapatkan surat izin.

### **Nilai PMA/PMDN (Milyar)**

Realisasi kinerja tahun 2021 – 2022 mengalami peningkatan yaitu tahun 2021 sebesar 278.269.682.501 dan tahun 2022 sebesar 2.300.998.887.802 dengan capaian kinerja tahun 2021 sebesar 93% dan tahun 2022 sebesar 680%.

Keberhasilan pencapaian kinerja Nilai PMA/PMDN disebabkan karena :

- Adanya kebijakan pemerintah melalui sistem perizinan berusaha secara online yang ditujukan untuk percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha serta mempermudah pelaku usaha, baik perorangan maupun non perorangan untuk mempermudah pendaftaran/pengurusan perizinan kegiatan usaha.
- Adanya dukungan Pemerintah pusat melalui alokasi DAK non fisik untuk pelaksanaan kegiatan Bimbingan Tekhnis dan Sosialisasi Pengaplikasian Sistem Perizinan Berusaha secara online (OSS) dan Pelaporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).
- Terbitnya Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal.
- Tertibnya pemantauan, pembinaan dan pengawasan penanaman modal yang didukung dengan pengalokasian anggaran DAK melalui pelaksanaan kegiatan seperti yang dapat diakses pada QR Code berikut :



ALOKASI  
DAK non fisik  
PENANAMAN  
MODAL

##### **5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Sumber daya adalah nilai potensi yang dimiliki Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam mencapai Tujuan/Sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam RENSTRA. Sumber daya yang dimiliki Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah sumber daya yang manusia, sarana dan prasarana kantor dan anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran 2022 untuk melaksanakan program kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi.

Efisiensi adalah ukuran tingkat penggunaan sumber daya dalam suatu proses. Semakin hemat/sedikit penggunaan sumber daya, maka prosesnya dikatakan semakin efisien. Berikut tabel untuk menganalisis efisiensi sumber daya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam pelaksanaan program,

kegiatan dan sub kegiatan :

**Tabel 3.7**  
**Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Sasaran	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Efisiensi Sumber Daya (%)
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)	
a	b	c	d	e (d/c x 100%)	F	G	h (g/f x 100%)	i (e-h)
Meningkatnya Kualitas Pelayanan DPMPPTSP	Indeks Kepuasan Masyarakat	A	A	100%	6.515.959.538	6.352.513.573	97%	100%
Meningkatnya Daya Tarik Investasi Penanaman Modal di Kabupaten Bone	Nilai PMA/PMDN (Milyar)	350.000.000.000	2.300.998.887.802	680%	1.103.367.000	1.047.723.350	95%	100%
				<b>780%</b>	<b>7.619.326.538</b>	<b>7.400.236.923</b>	<b>97%</b>	<b>100%</b>

Berdasarkan hasil analisis efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran), yaitu perbandingan antara kinerja dengan anggaran, maka dapat dilihat bahwa pada pelaksanaan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terdapat efisiensi anggaran dan efektivitas penggunaan dana berdasarkan kinerja sebagai berikut :

#### **Indeks Kepuasan Masyarakat**

Dengan capaian Kinerja sebesar 100 % dan capaian anggaran sebesar 97% menunjukkan efisiensi sumber daya sebesar 100%

#### **Nilai PMA/PMDN (Milyar)**

Dengan capaian kinerja sebesar 680% dan capaian anggaran sebesar 95% menunjukkan efisiensi sumber daya sebesar 100%

Dari capaian tersebut kedua indikator mencapai 100% hal ini dapat dilihat dari tabel diatas yakni Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat dengan target A dan Realisasi A dan Nilai Investasi dengan Target 350.000.000.000 dengan realisasi 2.300.998.887.802.

## 7. Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang menunjang Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian Kinerja

Analisis teradap program/kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai berikut :

**Tabel 3.8**  
**Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan /Kegagalan Pencapaian Kinerja**

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA OUTCOME /OUTPUT	SATUAN KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	RENCANA TINDAK LANJUT
	Meningkatkan Kualitas Pelayanan DPMPTSP		Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	A	A	100%	Meningkatkan kualitas pelayanan baik pelayanan secara online maupun pelayanan secara langsung
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Capaian Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah	Persen	100	100	100%	Memberikan Reward dan Punishmen bagi ASN yang berprestasi dan melakukan pelanggaran sehingga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian ASN dan Non ASN akan tugas dan fungsi dalam organisasi
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tepat waktu (persen)	Persen	100	100	100%	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun dan ditetapkan (dokumen)	Dokumen	2	3	150%	

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA OUTCOME /OUTPUT	SATUAN KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	RENCANA TINDAK LANJUT
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan Tepat waktu (persen)	Persen	100	100	100%	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Laporan Realisasi Pembayaran Gaji dan tunjangan bagi ASN (laporan)	Laporan	14	14	100%	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Realisasi Pelaksanaan Sub Kegiatan Administrasi Kepegawaian Daerah	Persen	100	100	100%	
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah laporan pengadaan pakaian dinas (laporan)	Laporan	1	1	100%	
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Laporan Pendidikan dan Pelatihan yang diikuti (laporan)	Laporan	1	1	100%	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pemenuhan Administrasi Umum Kantor (persen)	Persen	100	100	100%	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor (laporan)	Laporan	12	100	833%	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Laporan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (laporan)	Laporan	4	12	300%	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah laporan penyediaan Bahan Logistik Kantor (laporan)	Laporan	12	4	33%	

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA OUTCOME /OUTPUT	SATUAN KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	RENCANA TINDAK LANJUT
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah laporan penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (laporan)	Laporan	12	12	100%	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah laporan pembayaran Media Bahan Bacaan	Media	12	12	100%	
			Jumlah Laporan pembayaran Media yang Menyangkan Iklan	Media	12	12	100%	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Perjalanan Dinas (laporan)	Laporan	170	104	61%	
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah laporan pemeliharaan Sistem Pemerintahan berbasis elektronik (laporan)	Laporan	1	1	100%	
		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Presentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (persen)</b>	<b>Persen</b>	<b>40</b>	<b>30</b>	<b>75%</b>	Mendata dan mengevaluasi kebutuhan sarana dan prasarana yang menunjang urusan organisasi
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Laporan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan (laporan)	Laporan	1	1	100%	
		Pengadaan Mebel	Jumlah Laporan Pengadaan Mebeleur (laporan)	Persen	1	1	100%	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Laporan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (laporan)	Laporan	1	1	100%	

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA OUTCOME /OUTPUT	SATUAN KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	RENCANA TINDAK LANJUT
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	100	100%	Mengevaluasi kebutuhan pemenuhan jasa penunjang urusan organisasi
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Telepon/WiFi dan TV Kabel (rekening)	Rekening	24	24	100%	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Pembayaran Jasa Pelayanan Umum Kantor (laporan)	Laporan	3	3	100%	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam Kondisi Baik (persen)	Persen	100	100	100%	Melaksanakan dan mengevaluasi Barang Milik Daerah yang membutuhkan pemeliharaan
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Laporan Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan (laporan)	Laporan	12	12	100%	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Laporan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (laporan)	Laporan	12	12	100%	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Laporan Pemeliharaan / Rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung Kantor dan bangunan lainnya (laporan)	Laporan	1	1	100%	
		<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>Presentase Ketepatan waktu penerbitan izin sesuai SOP (persen)</b>	Persen	85	80	94%	
								Meningkatkan mutu pelayanan publik

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA OUTCOME /OUTPUT	SATUAN KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	RENCANA TINDAK LANJUT
		Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah laporan Izin yang telah dikaji, diteliti dan ditinjau (laporan)	Laporan	1800	277	15%	
			Jumlah Dokumen Standar Pelayanan yang disusun (dokumen)	Dokumen	1	1	100%	
			Jumlah laporan izin terbit yang diarsipkan (laporan)	Laporan	7700	8095	105%	
		Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal	Jumlah dokumen hasil Monev penyelesaian perizinan (dokumen)	Dokumen	1	1	100%	Mengevaluasi hasil pemantauan dan pengawasan terhadap pelaku usaha terkait pemenuhan komitmen kepemilikan izin
			Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Perizinan (dokumen)	Dokumen	1	1	100%	
			Jumlah Dokumen hasil Survey Kepuasan Masyarakat (dokumen)	Dokumen	1	1	100%	
		Penyediaan Pelayanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan	Jumlah Laporan Konsultasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Laporan	5	5	100%	Meningkatkan tindak lanjut pengaduan dan pelayanan konsultasi perizinan dan non perizinan
<b>Meningkatkan Nilai Investasi Penanaman Modal di Kabupaten Bone</b>			Presentase Peningkatan Investasi (persen)	Persen	18	782	4344%	Melaksanakan inovasi pelayanan perizinan dan penanaman modal

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA OUTCOME /OUTPUT	SATUAN KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	RENCANA TINDAK LANJUT
	Meningkatkan Daya Tarik Investasi Penanaman Modal di Kabupaten Bone		Nilai PMA/PMDN (Milyar)	Milyar	350.000.000.000	2.300.998.887.802	680%	Menciptakan iklim investasi melalui dengan melaksanakan peta potensi
		<b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>	<b>Presentase Capaian Nilai Realisasi Investasi Penanaman Modal (persen)</b>	<b>Persen</b>	<b>18</b>	<b>782</b>	<b>4344%</b>	Mengevaluasi implementasi PERDA Insentif/Kemudahan berusaha bagi investor
		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Investor yang mendapatkan pemberian fasilitas/Insentif yang menjadi kewenangan (persen)	Persen	100	100	100%	
		Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Dokumen PERDA/Regulasi Pemberian Fasilitas/Insentif Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah (dokumen)	Dokumen	1	1	100%	
			Jumlah Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Pemberian Fasilitas / Insentif Penanaman Modal (dokumen)	Dokumen	1	1	100%	
		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Presentase wilayah Kabupaten Bone yang telah disusun kedalam peta potensi investasi (persen)	Persen	100	100	100%	

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA OUTCOME /OUTPUT	SATUAN KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	RENCANA TINDAK LANJUT	
		Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kajian dan Evaluasi Pelaksanaan RUPM (dokumen)	Dokumen	1	1	100%	Mengevaluasi pelaksanaan PERDA Rencana Umum Penanaman Modal	
		Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Peluang Investasi (dokumen)	Dokumen	1	1	100%		
		<b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>	<b>Presentase Peningkatan Jumlah Investor Penanaman Modal (persen)</b>	<b>Persen</b>	<b>15</b>	<b>77</b>	<b>7700%</b>	Melaksanakan Inovasi terkait promosi Potensi Penanaman Modal Kabupaten Bone melalui media online dan keikutsertaan dalam wadah IPRO	
		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Investor Penanaman Modal (investor)	Investor	150	431	287%		
		Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Laporan Seminar Bisnis, Forum, one on one meeting (laporan)	Laporan	1	1	100%		
			Jumlah Kegiatan Penerimaan Misi Penanaman Modal	Kegiatan	1	1	100%		
		Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Kegiatan Pameran yang diikuti (laporan)	Laporan	4	6	150%		
		<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>Presentase Perusahaan yang taat terhadap ketentuan penanaman modal (persen)</b>	<b>Persen</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>100%</b>		Memaksimalkan penggunaan Dana DAK Non Fisik dalam memantau

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA OUTCOME /OUTPUT	SATUAN KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	RENCANA TINDAK LANJUT
		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase perusahaan yang menyampaikan LKPM (persen)	Persen	75	50	67%	mengawasi dan membina pelaku usaha untuk taat terhadap ketentuan penanaman modal
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah laporan Perusahaan yang dipantau (laporan)	Laporan	60	74	117%	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah laporan kegiatan pembinaan pelaksanaan Penanaman Modal (laporan)	Laporan	35	240	686%	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Laporan Perusahaan yang diawasi (laporan)	Laporan	15	187	1247%	
		<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>	<b>Presentase ketersediaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan (persen)</b>	<b>Laporan</b>	<b>85</b>	<b>85</b>	<b>100%</b>	
		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Informasi Lembaga lainnya yang terintegrasi dengan sistem informasi perizinan berusaha	Laporan	1	1	100%	

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA OUTCOME /OUTPUT	SATUAN KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	RENCANA TINDAK LANJUT
		Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Sistem Informasi Perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik yang dikelola/dikembangkan	Persen	1	1	100%	

*Sumber data : Laporan Evaluasi RENJA Tahun 2022*

Berdasarkan tabel diatas tentang analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan pencapaian kinerja, disampaikan hal sebagai berikut :

#### **Indeks Kepuasan Masyarakat.**

Dengan target A, capaian A atau sebesar 100%.

Indikator ini dapat terlaksana melalui program :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
- b. Program Pelayanan Penanaman Modal

#### **Nilai PMA/PMDN (Milyar).**

Dengan target Rp. 350.000.000.000 dan

realisasi Rp. 2.300.998.887.802 indikator ini dapat terlaksana melalui program :

- a. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

### **Hambatan dalam pencapaian target kinerja**

#### **Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat**

- a. Masih kurangnya inovasi terkait pelayanan perizinan dan non perizinan.
- b. Kurangnya pemahaman petugas pelayanan khususnya pada area *Front Office* dalam hal memberikan pelayanan yang baik.
- c. Aplikasi perizinan yang dapat memudahkan masyarakat masih kurang.

#### **Nilai PMA/PMDN**

- a. Sosialisasi Peraturan Bupati tentang pemberian insentif/kemudahan penanaman modal belum menjangkau seluruh masyarakat Kabupaten Bone
- b. Aplikasi peta potensi penanaman modal Kabupaten Bone belum tersedia

Penyelenggaraan  
Mal Pelayanan Publik (MPP)  
Kabupaten Bone  
yang sudah siap launching  
pada  
tahun 2023 diharapkan  
mampu  
meningkatkan mutu  
pelayanan publik  
di Kabupaten Bone serta  
menciptakan  
iklim investasi yang kondusif  
untuk peningkatan investasi



B.

### UPAYA PERBAIKAN

Berdasarkan hasil evaluasi program kegiatan yang dilaksanakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Tahun 2022 dengan melalui 7 analisa capaian kinerja sebagaimana tersebut diatas, ada beberapa upaya perbaikan yang dilakukan untuk pencapaian kinerja tahun berikutnya, yaitu :

#### Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat

- a. Peningkatan inovasi pelayanan
- b. Pembinaan Aparat Pelayanan *Front Office* dalam memberikan layanan kepada masyarakat
- c. Peningkatan aplikasi perizinan yang dapat memudahkan masyarakat

#### Nilai PMA/PMDN

- a. Mensosialisasikan Peraturan Bupati tentang pemberian insentif/kemudahan penanaman modal
- b. Menyiapkan aplikasi peta potensi penanaman modal Kabupaten Bone

## B. REALISASI ANGGARAN

Pagu anggaran belanja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone Tahun 2021 setelah perubahan sebesar Rp. 7.619.326.538 (*Tujuh Milyar Enam Ratus Sembilan Belas Juta Tiga Ratus Dua Pulu Enam Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah*) sebagaimana tabel sebagai berikut :

*Tabel 3.9*  
*Realisasi Anggaran Tahun 2022*

URAIAN	JUMLAH		
	ANGGARAN	REALISASI	%
<b>Tujuan 1: Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Urusan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</b>	<b>Rp 6.515.959.538</b>	<b>Rp 6.352.513.573</b>	<b>97%</b>
<b>Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan DPMPTSP</b>	<b>Rp 515.959.538</b>	<b>Rp 6.352.513.573</b>	<b>97%</b>
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Rp 5.892.264.538</b>	<b>Rp 5.799.433.923</b>	<b>98%</b>
<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>Rp 623.695.000</b>	<b>Rp 553.079.650</b>	<b>89%</b>
<b>Tujuan 1: Meningkatkan Nilai Investasi Penanaman Modal di Kabupaten Bone</b>	<b>Rp 1.103.367.000</b>	<b>Rp 1.047.723.350</b>	<b>95%</b>
<b>Sasaran 1 : Meningkatnya Daya Tarik Investasi Penanaman Modal di Kabupaten Bone</b>	<b>Rp 1.103.367.000</b>	<b>Rp 1.047.723.350</b>	<b>95%</b>

<b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>	Rp	28.490.000	Rp	28.414.950	<b>100%</b>
<b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>	Rp	706.882.000	Rp	699.777.800	<b>99%</b>
<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>	Rp	355.476.000	Rp	310.180.400	<b>87%</b>
<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>	Rp	12.519.000	Rp	9.350.200	<b>75%</b>
	<b>Rp</b>	<b>7.619.326.538</b>	<b>Rp</b>	<b>7.400.236.923</b>	<b>97%</b>

*Sumber Data : Realisasi Anggaran DPMPTSP dalam aplikasi SIAEKUDA*

Anggaran pelaksanaan program dan kegiatan untuk mendukung pencapaian target indikator kinerja sasaran strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Bone pada tahun 2021 bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik APBD Kabupaten Bone T.A. 2022. Nilai pagu anggaran tahun 2022 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.

# BAB IV PENUTUP

## A. SIMPULAN UMUM

Nilai rata rata capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2022 adalah sebesar 390% dengan kategori pencapaian kinerja sangat tercapai / sangat berhasil , dengan capaian kinerja per indikator kinerja utama adalah

### **Indeks Kepuasan Masyarakat**

Capaian Kinerja tahun 2022 sebesar 100% dari target A dan realisasi A.

### **Nilai PMA/PMDN (Milvar)**

Capaian Kinerja pada tahun 2022 sebesar 680 % dari target 350.000.000.0000 dan realisasi sebesar 2.300.998.887.802

Hal ini menggambarkan bahwa kerja keras telah dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam pembangunan daerah. Upaya ini telah mencakup perumusan dan penetapan kinerja tahunan dan juga menengah sebagai bagian dari kebijakan strategis maupun tahunan daerah, khususnya dalam RENSTRA dan RENCANA KERJA (RENJA) 2022, yang mencakup juga penentuan program/kegiatan dan alokasi anggarannya. Juga mencakup bukan hanya sekedar pelaksanaan program/kegiatan yang rutin dilakukan, namun juga pengembangan inovasi dalam berbagai bentuk.

LKj bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu juga menjadi punya makna strategis, sebagai bagian dari penerjemahan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pengukuran-pengukuran kinerja telah dilakukan, dan dikuatkan dengan data pendukung yang mengurai bukan hanya pencapaian tahun pelaporan 2022, namun juga melihat tren pencapaiannya dari tahun ke tahun, dan kontribusinya untuk pencapaian target akhir RENSTRA. Secara umum, nampak bahwa kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada tahun 2022 adalah sangat baik, karena terdapat 2 indikator memenuhi kriteria sangat tinggi.

## A. KENDALA PELAKSANAAN DAN UPAYA MENGATASI

### - **Kendala**

Meskipun nilai rata rata capaian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2022 sebagaimana yang telah diuraikan diatas namun demikian, beberapa tantangan perlu menjadi fokus bagi perbaikan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ke depan, dalam hal ini

- Keterampilan aparatur dalam mengoperasikan komputer/ laptop masih sangat minim sehingga dianggap menghambat pelayanan perizinan khususnya layanan perizinan secara online;
- Sarana dan prasarana penunjang pelayanan perizinan dan penanaman modal masih belum cukup untuk memberikan pelayanan sesuai SOP.

### - **Upaya mengatasi**

- Melaksanakan Pemantauan dan Pembinaan berupa Bimbingan Tekhnis kepada Aparatur khususnya petugas layanan perizinan dan non perizinan;
- Memprioritaskan anggaran untuk penyediaan sarana dan prasarana pendukung layanan perizinan dan non perizinan.

Untuk tahun 2023 dengan keberadaan Mal Pelayanan Publik diharapkan mampu memberikan layanan kepada masyarakat dengan mudah dan cepat.

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja pemerintah daerah yang menjadi tujuan dari penyusunan LKj, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan oleh instansi di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Beberapa permasalahan dan solusi yang sudah dirumuskan akan menjadi tidak punya makna jika hanya berhenti menjadi laporan saja, namun harus ada rencana dan upaya konkret untuk menerapkannya dalam siklus perencanaan dan pelaksanaannya. Hal ini akan menjadikan LKj benar-benar menjadi bagian dari sistem monitoring dan evaluasi untuk pijakan peningkatan kinerja pemerintahan dan perbaikan layanan publik.